

**ANALISIS KAUSALITAS PENGELUARAN SEKTOR PUBLIK
DENGAN PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Pendekatan Model *Vector Autoregression, VAR*)**

Oleh
Hasdi Aimon
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UNP

Abstract

This study aims to determine the effect of public sector expenditure lag, and the lag of the regional economy to the economy of West Sumatra Province and the lag effect of the regional economy, and the lag of public sector spending on public sector expenditures West Sumatra Province. This research is a quantitative descriptive and associative. The analysis model used in this study is a model of Vector Autoregression (VAR models) using simulation (lag 1 and 2) and (lag 1, 2 and 3). The simulation results show the model VAR (lag 1 and 2) is more appropriate, because the SIC and AIC is smaller. The results showed that the local economy lag 1 and lag 2 public sector spending significant effect terhadap West Sumatra provincial economy. While the regional economy lag 1 and lag 1 public sector spending also significantly on public sector spending areas of West Sumatra province. In connection with these results, the study recommends that local governments pursue policies that constantly improve public sector spending so that spending on lag 1 and lag 2 plays a role in the regional economy so that these conditions have a causal effect between public sector spending and the economy of the province of West Sumatra.

Keywords: Regional economies, and public sector expenditure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lag pengeluaran sektor publik, dan lag perekonomian daerah terhadap perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Barat serta pengaruh lag perekonomian daerah, dan lag pengeluaran sektor publik terhadap pengeluaran sektor publik Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan asosiatif. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Autoregression (model VAR) dengan menggunakan simulasi (lag 1 dan 2) dan (lag 1, 2 dan 3). Hasil simulasi memperlihatkan Model VAR (lag 1 dan 2) lebih tepat, karena SIC dan AIC nya lebih kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian daerah lag 1 dan pengeluaran sektor publik lag 2 berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah provinsi Sumatera Barat. Sedangkan perekonomian daerah lag 1 dan pengeluaran sektor publik lag 1 juga berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran sektor publik daerah provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan hasil tersebut, maka penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan kebijakan yang selalu meningkatkan pengeluaran sektor publik agar pengeluaran pada lag 1 dan lag 2 berperan dalam perekonomian daerah sehingga kondisi tersebut memiliki dampak kausalitas antara pengeluaran sektor publik dan perekonomian daerah provinsi Sumatera Barat.

Kata kunci : Perekonomian daerah, dan Pengeluaran sektor publik.

A. Pendahuluan

Sumatera Barat merupakan satu provinsi yang sampai saat ini terus melakukan dan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang hidup adil dan sejahtera. Peningkatan pendapatan per kapita merupakan hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, dengan cara menghitung total pendapatan daerah dalam waktu atau periode tertentu di bagi dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah. Melalui pendekatan pendapatan perkapita, daerah mencoba melihat seberapa jauh perkembangan ekonomi daerah yang akan berdampak pada pengeluaran sektor publik daerah untuk kesejahteraan masyarakat, demikian juga sebaliknya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita daerah yang akan mendorong meningkatnya kegiatan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi seperti ini yang diharapkan di setiap daerah, karena peningkatan kegiatan perekonomian yang cukup pesat akan dibarengi dengan peningkatan PDRB per kapita yang tinggi pula. Sehingga, ekonomi yang dicapai oleh daerah kabupaten/kota hampir dapat dipastikan dapat berdampak pada peningkatan pengeluaran sektor publik terutama pengeluaran sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum yang akhir juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal daerah, maka diperlukan adanya pengeluaran yang dapat mendorong kesejahteraan yang telah ditetapkan didalam APBD. Alokasi pengeluaran tersebut tertuang dalam rincian pengeluaran APBD meliputi pengeluaran rutin dan juga pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin diarahkan untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan secara optimal dan memperbesar tabungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan nasional. Pengeluaran pembangunan diarahkan kepada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Sriyana dan Rosyidah (2007) di Majalengka terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran pembangunan pemerintah pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan perekonomian daerah dan akhirnya tercipta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Selanjutnya Todaro and Smith, (2011) mengemukakan bahwa pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah daerah untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini juga diperkuat oleh Mankiw, (2007) pengembangan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu daerah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.

Selain itu, Widianingsih, dan Pristiwati, (2011) mengemukakan bahwa kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas melalui pengeluaran kesehatan. Sejalan dengan itu, temuan penelitian Evelyn, (2013) pengeluaran kesehatan dan pengeluaran pelayanan umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Sehubungan dengan itu, maka penelitian hendak melihat dan menganalisis kausalitas pengeluaran sektor publik dengan perekonomian daerah provinsi Sumatera Barat. Dimana pengeluaran sektor publik pada penelitian ini alokasi pengeluaran pemerintah untuk belanja modal yang digunakan untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan dan pelayanan umum, sedangkan perekonomian daerah yang dilihat pada peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku per kapita dari periode ke periode.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berlandaskan kepada teori pengeluaran pemerintah (*government spending*) dan perekonomian yang dikemukakan oleh Adolph Wagner, dalam Musgrave and Musgrave, (2003) yang terkenal dengan hukum pengeluaran pemerintah (*the law of government expenditure*) bahwa apabila pemerintah selalu melakukan peningkatan pengeluarannya maka perekonomian juga akan meningkat, sebaliknya apabila perekonomian meningkat maka pemerintah harus pula meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah dimaksud sesuai apa yang menjadi tujuan dari desentralisasi atau otonomi daerah yang dikemukakan oleh Mardiasmo, (2002) bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) yang akhirnya akan memajukan perekonomian daerah. Hal ini, tentu terkait dengan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Wagner, maka Hindriks dan Myles, (2004) juga mengatakan bahwa kegiatan ekonomi menghasilkan kebutuhan untuk pengeluaran publik, salah satu peran ekonomi publik adalah untuk menentukan bagaimana pendapatan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Hal ini tentu perlu dilakukannya biaya untuk di kenakan pada perekonomian. Biaya tersebut berasal dari dari penerimaan pajak. Ekonomi publik yang dapat menggambarkan keadaan ini keterkaitan antara pengeluaran publik dan perekonomian.

Selanjutnya, Noor, (2013) mengemukakan bahwa perekonomian akan mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah atau Negara, paling tidak ditentukan oleh 2 (dua) hal, (a) masyarakat mempunyai sumber pendapatan, tentu saja apabila memiliki pekerjaan dan tentunya ini merupakan cerminan dari perekonomian wilayah atau negara, (b) terpenuhinya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik). Kedua hal ini menuntut kemampuan pemerintah menyediakan berbagai fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian,

produktivitas masyarakat sebagai tenaga kerja akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah.

Jadi, berlandaskan kepada konsep dan teori yang telah dikemukakan di atas akan menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran sektor publik akan meningkatkan perekonomian daerah selanjut peningkatan perekonomian daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah sektor publik. Sehingga, atas dasar itu model analisis yang digunakan adalah Model Vector Autoregression (Model VAR), secara matematik dapat ditulis sebagai berikut;

$$a. Ekoda_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i Ekoda_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_i Publik_{t-i} + \mu_{1t}$$

$$b. Publik_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i Ekoda_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_i Publik_{t-i} + \mu_{2t}$$

dimana; Ekoda adalah perekonomian daerah

Publik adalah pengeluaran pemerintah sektor publik

α_i adalah koefisien estimasi ke i untuk perekonomian daerah

β_i adalah koefisien estimasi ke i untuk pengeluaran pemerintah sektor publik

μ_{1t} adalah error term untuk model analisis (a)

μ_{2t} adalah error term untuk model analisis (b)

Kedua model analisis tersebut akan diskenariokan dalam bentuk dua kali estimasi untuk mencari model yang tepat yaitu; pertama dengan lag(t-1) dan lag(t-2), yang kedua dengan lag(t-1), lag(t-2), dan lag(t-3). Ternyata model VAR yang tepat dan baik adalah model VAR dengan lag(t-1) dan lag(t-2).

C. Hasil dan Pembahasan

Pengeluaran sektor publik daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat diproxi berdasarkan belanja pemerintah daerah pada APBD yang ditujukan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Pengeluaran sektor publik secara keseluruhan memperlihatkan variasi peningkatan dari tahun ke tahun untuk setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dari sisi lain, variasi itu juga terlihat pada rata-rata pengeluaran publik untuk setiap daerah dan juga pada rata-rata persentase perkembangan pengeluaran sektor publik antar daerah. Atas dasar demikian itu, maka rata-rata dan perkembangan pengeluaran sektor publik dari tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Rata-rata dan Perkembangan Pengeluaran Sektor Publik
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 – 2012 (dalam Ribu Rupiah dan persentase)

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata	
		2008	2009	2010	2011	2012	Rupiah	Perkembangan
1	Kab. Kep. Mentawai	148.391	181.984	249.582	379.193	377.253	267.281	30,85
2	Kab. Pesisir Selatan	226.121	411.922	405.868	473.634	509.475	405.404	25,06
3	Kab. Solok	225.490	349.575	360.263	396.977	439.036	354.268	18,94
4	Kab. Sijunjung	149.204	305.423	304.155	345.742	360.740	293.053	28,36
5	Kab. Tanah Datar	202.990	400.220	377.347	492.858	488.401	392.363	28,12
6	Kab. Padang Pariaman	249.695	468.222	376.253	520.119	514.096	425.677	21,18
7	Kab. Agam	300.421	529.301	464.535	501.732	523.490	463.896	14,85
8	Kab. Limapuluh Kota	263.443	377.433	436.793	448.537	457.335	396.708	14,72
9	Kab. Pasaman	266.768	276.200	268.603	323.640	331.059	313.254	4,82
10	Kab. Solok Selatan	131.342	166.002	103.813	244.687	231.299	175.429	15,22
11	Kab. Dharmasraya	249.466	267.632	234.242	267.556	297.519	263.283	3,85
12	Kab. Pasaman Barat	170.395	266.075	331.435	350.028	387.034	300.993	25,43
	Total	2.583.726	3.999.989	3.912.889	4.744.703	4.916.737	4.000.473	18,06
	Ratat-rata	215.310	333.332	326.074	395.392	409.728	333.373	18,06
13	Kota Padang	427.503	624.411	658.585	782.673	846.200	667.874	19,59
14	Kota Solok	93.242	69.062	90.429	243.447	260.468	151.330	35,87
15	Kota Sawahlunto	114.042	164.033	190.428	239.416	237.884	189.161	21,72
16	Kota Padang Panjang	106.211	71.479	146.336	231.350	223.283	155.732	22,05
17	Kota Bukittinggi	139.727	219.640	227.755	284.645	280.451	230.444	20,14
18	Kota Payakumbuh	128.394	160.299	239.527	273.877	281.812	216.782	23,90
19	Kota Pariaman	142.962	173.443	175.488	197.793	237.966	185.530	13,29
	Total	1.152.081	1.482.367	1.728.548	2.253.201	2.368.064	1.796.852	21,11
	Ratat-rata	164.583	211.767	246.935	321.886	338.295	256.693	21,11

Sumber: BPS Sumatera Barat, (diolah, 2013)

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran sektor publik untuk Kabupaten sebesar Rp. 333.373 ribu dengan tingkat rata-rata perkembangan sebesar 18,06 persen, sedangkan untuk Kota sebesar Rp. 256.693 ribu dengan tingkat rata-rata perkembangan sebesar 21,11 persen. Hal ini berarti bahwa dari segi pengeluaran sektor publik kabupaten lebih besar dari kota, tentu ini terjadi disebabkan jumlah penduduk di kabupaten lebih besar di bandingkan dengan di kota. Namun demikian, rata-rata persentase perkembangan pengeluaran sektor publik kota lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten.

Apabila kita cermati per daerah tentang pengeluaran sektor publik tersebut, maka daerah kabupaten yang pengeluaran sektor publiknya di atas rata-rata adalah Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, dan selebihnya pengeluaran sektor publik besarnya di bawah rata-rata pengeluaran sektor publik daerah kabupaten. Sehubungan dengan itu, apabila dilihat pula dari sisi rata-rata persentase perkembangan pengeluaran sektor publik hal ini jadi berbeda. Dimana kabupaten Kepulauan Mentawai, Sijunjung, dan Pasaman Barat memperlihatkan tingkat perkembangan pengeluaran sektor publiknya di atas rata-rata persentase perkembangan pengeluaran sektor publik kabupaten. Walaupun demikian untuk kabupaten Pasaman, Solok Selatan, dan Damasraya baik dari sisi rata-rata pengeluaran maupun dari sisi perkembangan pengeluaran sektor publik masih perlu mendapat perhatian bagi pengambil kebijakan tentang alokasi belanja pemerintah daerah.

Selanjutnya, apabila kita cermati pula tentang pengeluaran sektor publik daerah kota, maka daerah kota yang pengeluaran sektor publiknya di atas rata-rata adalah hanya kota Padang sebesar Rp. 667.874 ribu, angka ini jauh melampaui pengeluaran sektor publik dari kota-kota lainnya di provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, tingkat rata-rata perkembangan pengeluaran sektor publiknya berada di bawah rata-rata yaitu sebesar 19,59 persen. Walaupun daerah kota Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, dan Payakumbuh rata-rata pengeluaran sektor publiknya rendah tetapi tingkat perkembangan pengeluaran sektor publiknya relatif tinggi yaitu 35,87 persen, 21,72 persen, 22,05 persen dan 23,90 persen. Jadi, pemerintah kota di provinsi Sumatera Barat perlu mencermati pengeluaran sektor publiknya, apabila ingin meimplementasikan hukum Wagner yang sudah dikemukakan di atas. Hal ini, tentu saja terkait dengan tujuan penelitian ini, maka pemerintah kota di provinsi Sumatera Barat perlu mengimplikasikan kebijakan sektor publik tersebut.

Perekonomian daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat diproxi berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku per kapita. Perekonomian daerah secara keseluruhan juga memperlihatkan variasi peningkatan dari tahun ke tahun. Dari sisi lain, variasi itu juga terlihat pada rata-rata perkembangan perekonomian daerah. Dengan demikian, maka rata-rata dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Rata-rata dan Perkembangan Perekonomian Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 – 2012 (dalam Ribu Rupiah dan persentase)

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata	
		2008	2009	2010	2011	2012	Rupiah	Perkembangan
1	Kab. Kep. Mentawai	13.580	16.150	18.780	18.890	21.120	17.704	11,10
2	Kab. Pesisir Selatan	7.070	8.100	9.100	10.760	12.050	12.254	14,09
3	Kab. Solok	12.050	9.730	11.370	12.890	15.230	12.254	5,28
4	Kab. Sijunjung	10.490	11.950	13.110	15.050	16.740	13.468	11,92
5	Kab. Tanah Datar	11.380	13.030	14.390	16.020	17.770	14.518	11,23
6	Kab. Padang Pariaman	11.400	13.240	14.350	16.040	17.640	14.534	10,95
7	Kab. Agam	10.240	12.110	13.500	14.490	16.180	13.304	11,60
8	Kab. Limapuluh Kota	12.740	15.140	16.560	18.060	20.300	16.560	11,87
9	Kab. Pasaman	9.730	10.020	11.040	12.960	14.600	11.490	10,01
10	Kab. Solok Selatan	7.070	8.070	9.120	9.760	11.120	9.028	11,46
11	Kab. Dharmasraya	10.180	11.660	12.590	13.990	15.840	12.852	11,12
12	Kab. Pasaman Barat	12.560	14.610	16.300	17.310	19.540	16.064	11,11
	Total	128.490	143.810	160.210	176.220	198.130	164.030	10,84
	Ratat-rata	10.708	11.984	13.351	14.685	16.511	13.669	10,84
13	Kota Padang	20.720	23.510	24.940	29.500	32.650	26.264	11,52
14	Kota Solok	13.250	15.250	16.400	18.450	20.410	16.752	10,81
15	Kota Sawahlunto	13.900	15.870	17.850	19.720	22.140	17.896	11,86
16	Kota Padang Panjang	11.970	13.470	15.090	19.550	21.880	16.392	16,56
17	Kota Bukittinggi	13.770	16.020	17.850	19.600	21.700	17.788	11,52
18	Kota Payakumbuh	12.190	14.160	15.460	16.140	18.250	15.240	9,94
19	Kota Pariaman	15.970	18.670	18.880	20.010	22.290	19.164	7,91
	Total	101.770	116.950	126.470	142.970	159.320	129.496	14,14
	Ratat-rata	14.539	16.707	18.067	20.424	22.760	18.499	14,14

Sumber: BPS Sumatera Barat, (diolah, 2013)

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa besaran rata-rata perekonomian Kabupaten yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku per kapita adalah sebesar Rp.13.669 ribu dengan tingkat rata-rata perkembangannya sebesar 10,84 persen, sedangkan untuk Kota juga diukur dengan cara yang sama yaitu sebesar Rp. 18.499 ribu dengan tingkat rata-rata perkembangannya sebesar 14,14 persen. Hal ini berarti bahwa perekonomian Kota lebih pesat perkembangannya bila dibandingkan dengan daerah kabupaten di provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentu disebabkan perkembangan pusat-pusat perekonomian kota lebih baik dibandingkan dengan kabupaten. Selain itu, perekonomian Kabupaten lebih berbasiskan kepada sektor primer sedangkan di kota lebih berbasiskan kepada sektor sekunder dan jasa..

Jika dicermati perekonomian daerah tersebut per kabupaten dan kota, maka daerah kabupaten yang perekonomiannya di atas rata-rata perekonomian kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, Padang Pariaman, Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat, selebihnya perekonomian daerahnya di bawah rata-rata perekonomian daerah kabupaten. Namun demikian, apabila dilihat pula dari sisi rata-rata persentase perkembangan perekonomian daerah hal ini jadi berbeda. Dimana kabupaten Pesisir Selatan, dan Solok Selatan perkembangan perekonomiannya di atas rata-rata perkembangan perekonomian daerah kabupaten. Jadi, daerah kabupaten baik tingkat perekonomian maupun perkembangan perekonomiannya yang perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan adalah daerah Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya, apabila kita cermati pula tentang perekonomian daerah kota, maka daerah kota yang perekonomian daerahnya di atas rata-rata adalah kota Padang sebesar Rp. 26.264 ribu, dan kota Pariaman sebesar Rp. 19.164 ribu. Sementara, kota Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, dan kota Payahkumbuh perekonomian daerahnya di bawah rata-rata perekonomian daerah perkotaan di provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, tingkat rata-rata perkembangan perekonomian kota Padang, Pariaman, Solok, Sawahlunto, Bukittinggi dan kota Payahkumbuh. Jadi rata-rata perkembangan perekonomian daerah kota yang di atas rata-rata perkembangannya hanya kota Padang Panjang. Sehubungan dengan itu, pemerintah kota di provinsi Sumatera Barat perlu mendorong perekonomian daerah perkotaan dengan meningkatkan infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya agar kegiatan perekonomian semakin meningkat di perkotaan di provinsi Sumatera barat.

Selanjutnya, dilakukan analisis dengan menskenariokan estimasi model VAR dengan lag(t-1) dan lag(t-2). Hasil estimasi model VAR tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Estimasi Perekonomian Daerah dan Pengeluaran Sektor Publik
Model VAR (lag 1 dan 2)

Vector Autoregression Estimates		
Date: 01/01/14 Time: 11:47		
Sample(adjusted): 3 95		
Included observations: 93 after adjusting endpoints		
Standard errors in () & t-statistics in []		
	EKODA	PUBLIK
EKODA(-1)	0.470045 (0.14728) [3.19147]	7.439604 (2.79768) [2.65921]
EKODA(-2)	0.229914 (0.15251) [1.50748]	0.601767 (4.96815) [0.12112]
PUBLIK(-1)	0.004817 (0.00463) [1.04134]	0.709916 (0.15069) [4.71095]
PUBLIK(-2)	0.010151 (0.00451) [2.25055]	0.002578 (0.14693) [0.01755]
C	6.292915 (1.51601) [4.15096]	195.6731 (49.3840) [3.96228]
R-squared	0.411779	0.416127
Adj. R-squared	0.385041	0.389587
Sum sq. Resids	1139.653	1209312.
S.E. equation	3.598694	117.2271
F-statistic	15.40088	15.67941
Log likelihood	248.4847	572.4541
Akaike AIC	5.451283	12.41837
Schwarz SC	5.587445	12.55453
Mean dependent	15.30871	310.8810
S.D. dependent	4.589041	150.0431
Determinant resid covariance (dof adj.)		84038.93
Determinant resid covariance		75245.40
Log likelihood		786.0483
Akaike information criterion		17.11932
Schwarz criterion		17.39164

Sumber: Data diolah, 2014

Indikator yang digunakan menyatakan sebuah model VAR yang tepat dan terbaik lag yang digunakan adalah membandingkan dengan beberapa lag interval kedalam model dan apabila lag interval yang memberikan R^2 terbesar dan AIC (*Akaike Information Criterion*) serta SIC (*Schwarz Criterion*) terkecil pada model analisis tersebut, maka model itu adalah terbaik. Hasil estimasi

model VAR dengan lag(t-1) dan lag(t-2) pada Tabel 3 di atas memperlihatkan R² sebesar 0,411779 AIC sebesar 17,119932 dan SIC sebesar 17,39164. Kemudian dilanjutkan dengan skenario model VAR dengan lag(t-1), lag(t-2), dan lag(t-3), hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Estimasi Perekonomian Daerah dan Pengeluaran Sektor Publik
Model VAR (lag 1, 2 dan 3)

Vector Autoregression Estimates		
Date: 01/01/14 Time: 11:55		
Sample(adjusted): 4 95		
Included observations: 92 after adjusting endpoints		
Standard errors in () & t-statistics in []		
	EKODA	PUBLIK
EKODA(-1)	0.481142 (0.15842) [3.03718]	7.973790 (3.14706) [2.53373]
EKODA(-2)	0.232001 (0.18189) [1.27551]	1.848291 (5.90967) [0.31276]
EKODA(-3)	0.014497 (0.15875) [0.09132]	1.470078 (5.15789) [0.28502]
PUBLIK(-1)	0.004510 (0.00485) [0.93083]	0.721422 (0.15743) [4.58261]
PUBLIK(-2)	0.010458 (0.00554) [1.88676]	0.010490 (0.18009) [0.05825]
PUBLIK(-3)	0.000997 (0.00485) [0.20549]	0.038589 (0.15769) [0.24472]
C	6.179757 (1.70427) [3.62605]	211.0278 (55.3726) [3.81105]
R-squared	0.409307	0.419308
Adj. R-squared	0.367611	0.378318
Sum sq. Resids	1137.247	1200517.
S.E. equation	3.657783	118.8433
F-statistic	9.816445	10.22952
Log likelihood	246.2129	566.4602
Akaike AIC	5.504628	12.46653
Schwarz SC	5.696503	12.65840
Mean dependent	15.27098	311.5473
S.D. dependent	4.599659	150.7269

Determinant resid covariance (dof adj.)	88307.00
Determinant resid covariance	75380.21
Log likelihood	777.6785
Akaike information criterion	17.21040
Schwarz criterion	17.59415

Sumber: data diolah, (2014)

Tabel 4 estimasi model VAR dengan lag(t-1), lag(t-2) dan lag(t-3) di atas memperlihatkan R² sebesar 0,409307 AIC sebesar 17,21040 dan SIC sebesar 17,59415. Jadi, apabila dibandingkan kedua skenario tersebut dapat disimpulkan bahwa skenario model VAR dengan lag(t-1) dan lag(t-2) lebih baik, karena R² lebih besar, AIC dan SIC lebih kecil dari model VAR dengan lag(t-1) lag(t-2) dan lag(t-3). Dengan demikian, untuk tujuan interpretasi hasil digunakan hasil estimasi pada Tabel 3.

Hasil estimasi dari Model VAR pada Tabel 3 di atas, persamaannya dapat ditulis secara matematik seperti berikut;

$$Ekoda_t = 6.293 + 0.470Ekoda_{t-1} + 0,230Ekoda_{t-2} + 0,005Publik_{t-1} + 0,010Publik_{t-2} + \mu_t$$

(1,51601) (0,14728) (0,15251) (0,00463) (0,00451)
[4,15096] [3,19147] [1,50748] [1,04134] [2,25055]

$$Publik_t = 195,673 + 7,440Ekoda_{t-1} + 0,602Ekoda_{t-2} + 0,710Publik_{t-1} + 0,003Publik_{t-2} + \mu_t$$

(49,3840) (2,79768) (4,96815) (0,15069) (0,14693)
[3,96228] [2,65921] [0,12112] [4,71095] [0,01755]

Nilai-nilai di bawah koefisien regresi VAR (dalam kurung) masing-masing ialah nilai standar error dan nilai t-statistik untuk uji signifikansi parsial dari masing-masing variabel. Setiap variabel baik Ekoda (perekonomian daerah) ataupun Publik (pengeluaran sektor publik) dipengaruhi oleh variabel itu sendiri dengan memakai lag(t-1) dan lag(t-2) serta variabel lainnya dengan memakai lag(t-1) dan lag(t-2) juga.

Model persamaan (1) *Koefisien Ekoda lag(t-1) pada model = 0,470* adalah signifikan pada alpha 5 persen. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan perekonomian daerah tahun sebelumnya sebesar 1 ribu rupiah akan menyebabkan kenaikan perekonomian daerah tahun sekarang sebesar 0,470 ribu rupiah, ceteris paribus. *Koefisien Ekoda lag(t-2) pada model = 0,230* adalah tidak signifikan pada alpha 5 persen. Jadi perekonomian daerah 2 tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap perekonomian daerah tahun sekarang. *Koefisien Publik (Pengeluaran Sektor Publik) lag(t-1) pada model = 0,005* adalah tidak signifikan pada alpha 5 persen. Selanjutnya *Koefisien Publik (Pengeluaran Sektor Publik) lag(t-2) pada model = 0,010* adalah signifikan pada alpha 5 persen. Ini berarti bahwa setiap kenaikan pengeluaran sektor publik 2 tahun sebelumnya sebesar 1 ribu rupiah akan menyebabkan perkembangan perekonomian daerah sebesar 0,010 ribu rupiah, ceteris paribus.

Model persamaan (2) untuk melihat kausalitasnya, maka *Koefisien Ekoda lag(t-1) pada model = 7,440* adalah signifikan pada alpha 5 persen. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan Ekoda (perekonomian daerah) tahun sebelumnya sebesar 1 ribu rupiah akan menyebabkan kenaikan pengeluaran sektor publik daerah tahun sekarang sebesar 7,440 ribu rupiah, ceteris paribus. *Koefisien Ekoda lag(t-2) pada model = 0,602* adalah tidak signifikan pada alpha 5 persen. Jadi perekonomian daerah 2 tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran sektor publik daerah tahun sekarang. Jadi, kondisi perekonomian daerah tahun sebelumnya sangat menentukan pengeluaran sektor publik tahun sekarang. *Koefisien Publik (Pengeluaran Sektor Publik lag(t-1) pada model = 0,710* adalah signifikan pada alpha 5 persen. Apabila terjadi kenaikan pengeluaran sektor publik tahun sebelumnya sebesar 1 ribu rupiah akan menyebabkan peningkatan pengeluaran sektor publik daerah sebesar 0,710 ribu rupiah, ceteris paribus. Selanjutnya *Koefisien Publik (Pengeluaran Sektor Publik lag(t-2) pada model = 0,003* adalah tidak signifikan pada alpha 5 persen. Dengan demikian, bahwa pengeluaran sektor publik daerah ditentukan oleh besaran pengeluaran sektor publik tahun sebelumnya saja.

Sehubungan dengan itu, bahwa perekonomian daerah tahun sekarang ditentukan oleh perekonomian daerah tahun sebelumnya dan pengeluaran sektor publik 2 tahun sebelumnya. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa pengeluaran sektor publik ini membutuhkan waktu 2 tahun baru memiliki dampak terhadap perekonomian daerah. Hal ini berbeda dengan pengeluaran sektor publik tahun sekarang ditentukan oleh kondisi perekonomian tahun sebelumnya dan pengeluaran sektor publik tahun sebelumnya. Jadi, pengeluaran sektor publik tahun sekarang betul-betul mempedoman kondisi masa lalu. Hal ini sesuai dengan hukum Wagner (*the law of government expenditure*).

D. Penutup

Perekonomian daerah dan pengeluaran sektor publik mempunyai hubungan kausalitas yang positif, dimana apabila perekonomian daerah meningkat maka pengeluaran sektor publik juga akan meningkat. Demikian juga sebaliknya apabila pengeluaran sektor publik meningkat maka perekonomian daerah juga akan meningkat walaupun membutuhkan waktu 2 tahun untuk itu.

Artikel ini merekomendasikan kepada seluruh pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pengeluaran sektor publik setiap tahunnya di atas amanat undang-undang, khusus pada sub sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Sehingga pengaruh simultan antara pengeluaran sektor publik dan perekonomian daerah tersebut semakin sesuai dengan hukum Wagner yang kebenarannya sudah melebihi di atas seratus tahun itu.

Daftar Pustaka

- Evelyn, (2013). *Analisis Dampak Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Sumatera Barat*, e-Jurnal Portal Garuda Universitas Negeri Padang.
- Mankiw N. Gregory. (2007). *Macroeconomics* Sixth Edition, Worth Publishers, New York.
- Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Musgrave A. Richard, and Musgrave B. Peggy, (2003). *Public Finance in Theory and Practice*, Seventh Edition, McGraw-Hill, Inc., New York.
- Noor, Henry Faisal, (2013). *Ekonomi Publik, Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Akademia Permata, Padang.
- Rosen S., Harvey, (2005). *Public Finance*, International Editin, Seventh Edition, McGraw-Hill, New York.
- Sriyana, Jaka dan Rosyidah Fitri. (2007). UNSIA. Vol. XXX No. 64. *Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Perekonomian Kabupaten Majalengka*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Todaro P, Micheal and Smith C. Stephen, (2011). *Economic Development*. Eleventh Edition, Addison Wesley, New York.
- Widianingsih, Yuni, dan Pristiwati, Noer. (2011). Talenta Ekonomi. Vol 5 No.1. *Mengukur Alokasi Anggaran Untuk Rakyat di Sektor Pendidikan (Studi Kasus APBD Kota Surakarta)*. Jawa Tengah: STIE Swastamandiri Surakarta.